

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anna Leonora, Tewernussa, S.H,M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Simbar Kristianto, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 9 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Manado

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 196202021986121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon



Anna Leonora, Tewernussa, S.H,M.H.
NIP.19721211 19980 3 2002

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	70 %
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	95 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	70 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti.	90 %

Kegiatan: Anggaran:
1. DIPA 01 BUA Rp. 5.590.313.000,-
2. DIPA 05 Dirjen Rp. 138.610.000,-

Ambon, 9 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Manado

Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 196202021986121001

Anna Leonora, Tewernussa, S.H.M.H.
NIP.19721211 19980 3 2002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pengki Nurpanji, S.H., M.H.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anna Leonora, Tewernussa, S.H,M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 9 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon

Anna Leonora, Tewernussa, S.H,M.H
NIP.19721211 19980 3 2002

Pihak Pertama

Wakil Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon

Pengki Nurpanji, S.H., M.H.
NIP. 197806192002121003

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	70 %
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	95 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	70 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti.	90 %

Kegiatan: Anggaran:
 1. DIPA 01 BUA Rp. 5.590.313.000,-
 2. DIPA 05 Dirjen Rp. 138.610.000,-

Ambon, 9 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon

Anna Leonora, Tewernussa, S.H.M.H
NIP.19721211 19980 3 2002

Pihak Pertama

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon

Pengki Nurpanji, S.H.M.H.
NIP. 197806192002121003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahcmad Lohy, S.A.g

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anna Leonora, Tewernussa, S.H,M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 9 Januari 2024

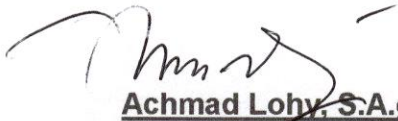
Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon

Anna Leonora, Tewernussa, S.H,M.H
NIP. 19721211 19980 3 2002

Pihak Pertama

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon


Achmad Lohy, S.A.g.
NIP. 197211092006041009

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	85 %
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	70 %
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	95 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	70 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti.	90 %

Kegiatan: Anggaran:
 1. DIPA 01 BUA Rp. 5.590.313.000,-
 2. DIPA 05 Dirjen Rp. 138.610.000,-

Ambon, 9 Januari 2024

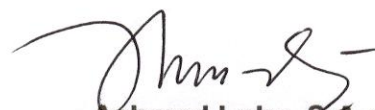
Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon

Anna Leonora, Tewernussa, S.H.M.H
 NIP. 19721211 19980 3 2002

Pihak Pertama

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon


Achmad Lohy, S.A.g.
 NIP. 197211092006041009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pieter P. Resimanuk, S.Sos, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anna Leonora, Tewernussa, S.H, M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 9 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon

Anna Leonora, Tewernussa, S.H, M.H
NIP. 19721211 19980 3 2002

Pihak Pertama

Paniter Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon


Pieter P. Resimanuk, S.Sos, S.H.M.H.
NIP. 197008181994031003

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	70 %
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	95 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	70 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti.	90 %

Kegiatan: Anggaran:
1. DIPA 01 BUA Rp. 5.590.313.000,-
2. DIPA 05 Dirjen Rp. 138.610.000,-

Ambon, 9 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon

Anna Leonora, Tewernussa, S.H.,M.H
NIP. 19721211 19980 3 2002

Pihak Pertama

Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon

Pieter P. Resimanuk, S.Sos, S.H.M.H.
NIP. 197008181994031003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeliana D. Goha S.H.,M.H.

Jabatan : Panmud Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Pieter P. Resimanuk, S.Sos, S.H.,M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

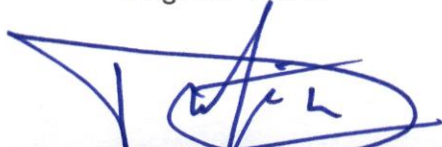
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 9 Januari 2024

Pihak Kedua

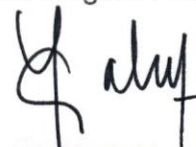
Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon



Pieter P. Resimanuk, S.Sos, S.H.M.H.
NIP. 197008181994031003

Pihak Pertama

Panmud Perkara Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon



Jeliana D. Goha S.H.M.H.
NIP. 197208151994032001

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

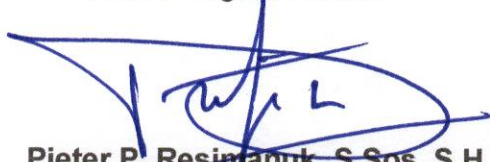
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	70 %
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	95 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	70 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti.	90 %

Kegiatan: Anggaran:
1. DIPA 01 BUA Rp. 5.590.313.000,-
2. DIPA 05 Dirjen Rp. 138.610.000,-

Ambon, 9 Januari 2024

Pihak Kedua

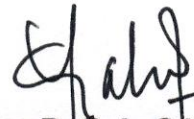
Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon



Pieter P. Resinjanuk, S.Sos, S.H.M.H.
IP. 197008181994031003

Pihak Pertama

Panmud Perkara Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon



Jeliana D. Goha S.H.M.H.
NIP. 197206151994032001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husin Slamet S.H.

Jabatan : Plh. Panmud Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Pieter P. Resimanuk, S.Sos, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 9 Januari 2024

Pihak Kedua

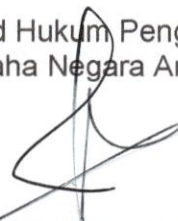
Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon



Pieter P. Resimanuk, S.Sos, S.H.M.H.
NIP. 197008181994031003

Pihak Pertama

Plt. Panmud Hukum Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon



Husin Slamet, S.H.
NIP. 196411091990051005

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

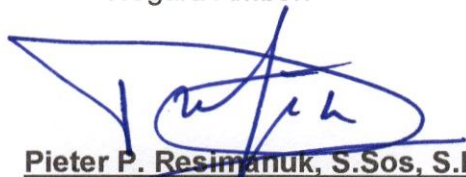
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	70 %
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	95 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	70 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti.	90 %

Kegiatan: Anggaran:
1. DIPA 01 BUA Rp. 5.590.313.000,-
2. DIPA 05 Dirjen Rp. 138.610.000,-

Ambon, 9 Januari 2024

Pihak Kedua

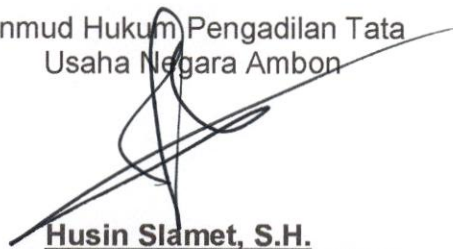
Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon



Pieter P. Resimanuk, S.Sos, S.H.M.H.
NIP. 197008181994031003

Pihak Pertama

Plh. Panmud Hukum Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon



Husin Slamet, S.H.
NIP. 196411091990051005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Steven Puturuhi, S.E.

Jabatan : Kasubag PTIP Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ahcmad Lohy, S.A.g

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

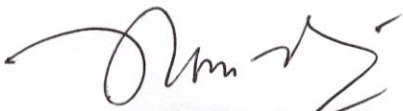
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 9 Januari 2024

Pihak Kedua

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon



Achmad Lohy, S.A.g.
NIP. 197211092006041009

Pihak Pertama

Kasubag PTIP Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon



Steven Puturuhi, S.E.
NIP. 198002152006041002

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	70 %
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	95 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	70 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti.	90 %

Kegiatan: Anggaran:
 1. DIPA 01 BUA Rp. 5.590.313.000,-
 2. DIPA 05 Dirjen Rp. 138.610.000,-

Ambon, 9 Januari 2024

Pihak Kedua

Sekretaris Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon


Achmad Lohy, S.A.g.
 NIP. 197211092006041009

Pihak Pertama

Kasubag PTIP Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon


Steven Puturuhi, S.E
 NIP. 197211092006041009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tukimi, S.Sos.

Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ahcmad Lohy, S.A.g

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 9 Januari 2024

Pihak Kedua

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Achmad Lohy".

Achmad Lohy, S.A.g.
NIP. 197211092006041009

Pihak Pertama

Kasubag PTIP Kepegawaian dan Ortala
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tukimi".

Tukimi, S.Sos.
NIP. 197103051994032002

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	70 %
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	95 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	70 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti.	90 %

Kegiatan:

1. DIPA 01 BUA
2. DIPA 05 Dirjen

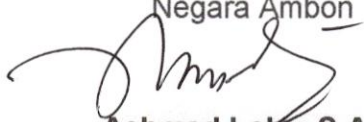
Anggaran:

- Rp. 5.590.313.000,-
- Rp. 138.610.000,-

Ambon, 9 Januari 2024

Pihak Kedua

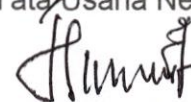
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon



Achmad Lohy, S.A.g.
NIP. 197211092006041009

Pihak Pertama

Kasubag PTIP Kepegawaian dan Ortala
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon



Tuki mi, S.Sos.
NIP. 197103051994032002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marsela Huwae, S.E., M.s.i

Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ahcmad Lohy, S.A.g

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

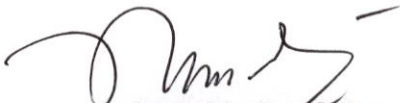
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 9 Januari 2024


Pihak Kedua

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon


Achmad Lohy, S.A.g.
NIP. 197211092006041009

Pihak Pertama

Kasubag Umum dan Keuangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon


Maesela Huwae, S.H.M.si
NIP. 198720112010041001

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	70 %
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	95 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	70 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti.	90 %

Kegiatan: Anggaran:
1. DIPA 01 BUA Rp. 5.590.313.000,-
2. DIPA 05 Dirjen Rp. 138.610.000,-

Ambon, 9 Januari 2024

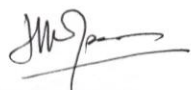
Pihak Kedua

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon


Achmad Lohy, S.A.g.
NIP. 197211092006041009

Pihak Pertama

Kasubag Umum dan Keuangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon


Maesela Huwae, S.H.M.si
NIP. 198720112010041001